

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU, MAKALAH, MAJALAH,

A. Mukti Arto, *Konsepsi Mahkamah Agung: Redefinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2001

Anang Zubaidy, *Kajian Terhadap Eksistensi Lembaga-Lembaga Negara*, Makalah disampaikan dalam Sarasehan Konstitusi Evaluasi Perjalanan 11 Tahun UUD Negara RI Tahun 1945 Pasca Amandemen, Acara ini diselenggarakan dalam rangka milad PSHK FH UII yang ke 5 (lima), Yogyakarta, 2 Maret 2012.

Bagir Manan, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta, 2003

_____, *Konvensi Ketatanegaraan*, CV Armico, Bandung, 1987

_____, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003

_____, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003

_____, & Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997

_____, "UUD 1945 Tak Mengenal Hak Prerogatif", *Harian Republika*, 27 Mei 2000, Jakarta

Franz Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1993

Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005

Harun Alrasyid, *Kajian Sistem Pemerintahan dan Ruang lingkupnya*, Majalah Mahasiswa Universitas Pasundan, Vol.3., No.III, Juni 2002, Bandung

Hasbullah F. Sjawie, *Lembaga Grasi Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Varia Peadilan Tahun IX No. 102 Maret 1994.

Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Sinar Harapan, Jakarta, 2001

I Made Leo Wiratama, Purifikasi Sistem Presidensiil, dalam Indra J. Piliang & T.A Legowo, *Disain baru sistem politik Indonesia*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 2006

- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, cet III, Aksara Baru, Jakarta, 1977
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- _____, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Mahkamah Konsitusi RI, Jakarta, 2005
- _____, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Kerjasama Mahkamah Konstiusi dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- _____, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cetakan pertama, Jakarta, 2006.
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- _____, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah telaah perbandingan konstitusi berbagai negara*, UI Press, Jakarta, 1996.
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- _____, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan keempat UUD Tahun 1945*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pembinaan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 14-18 Juli 2003, Denpasar
- _____, & Bagir Manan, (et.,al), *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Cet kedua, Setjen & Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006

- Laica Marzuki, *Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Hakekat serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan*, Makalah Disampaikan dalam Rangka Penataran Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tanggal 26-31 Agustus 1996, Ujung Pandang
- M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi revisi, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008)
- Moh. Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- _____, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan ketujuh*, Pusat Studi Hukum Tatanegara Universitas Indonesia, Jakarta, 1988.
- Muhammad Alim, *Pengujian Konstitusional Dalam Al Quran*, Majalah Hukum Varia Peradilan November 2008
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- _____, *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia, cet. I*, Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia bekerja sama dengan Gama Media, Yogyakarta, 1999
- _____, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, cet pertama*, UII Press, Yogyakarta, 2007
- _____, *Praktek Recall dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, Makalah, Diskusi Publik "Recall Anggota Legislatif oleh Parpol sebagai Wujud Pengkhianatan Hak Konstituen", yang diselenggarakan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 15 April 2011.
- _____, *Bahan Kuliah dalam Matakuliah Hukum Tata Negara*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, (tanpa tahun).

- Oksep Adhayanto, *Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Fisip Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Vol. 2, No. II, 2011, Riau.
- Philipus M Hadjon, (et.,al), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Cet. kesepuluh, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008
- R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana Posedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut Kitab Undang-Undang hukum Pidana Bagi Penegak Hukum, cet I*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1982
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, cet. pertama*, Liberty, Yogyakarta, 1997
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008
- Saldi Isra, *Saatnya Sidang Istimewa MPR*, Harian *Republika*, 1 Februari 2001, Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta, 2006
- Susilo Suharto, *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006
- Utrecht, *Hukum Pidana II, cet. ketiga*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1997

B. DATA ELEKTRONIK

- Advieserende Functie* Mahkamah Agung Dalam Pemberian Grasi, lihatlah dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fdadf177a456/iadvieserende-functie-i-ma-dalam-pemberian-grasi>
- Basrif Arief, Jaksa Agung siapa hadapi Yusril Ihza Mahendra Lagi, Lihatlah dalam <http://nasional.inilah.com/read/detail/1867414/jaksa-agung-siap-hadapi-yusril-lagi>
- Demokrat, Grasi adalah hak Prerogatif Presiden, lihatlah dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/05/29/m4rjun-demokrat-grasi-hak-prerogatif-presiden>,
- Denny Indrayana, Ada dimensi diplomatik terhadap pemberian grasi kepada Corby, Lihatlah dalam <http://www.tempo.co/read/news/2012/05/25/063406026/Denny-Akui-Grasi-Corby-Ada-Dimensi-Diplomasi>

Freingky A. Ndaumanu, *Konsekuensi Yuridis Dengan di Kecualikannya Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Politik Dalam Perkembangan Hukum Tata Usaha Negara*. Makalah disampaikan dalam tugas pokok mata kuliah Hukum Tata Usaha Negara Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Tahun 2012. Makalah diterbitkan dalam <http://www.slideshare.net/engkyndx/konsekuensi-yuridis-dengan-dikecualikannya-keputusan-tata-usaha-negara-yang-bersifat-politik-dalam-perkembangan>,

Gayus Lumbuun, Pengadilan Bisa Anulir Grasi Corby, lihatlah dalam <http://www.tempo.co/read/news/2012/05/31/063407428/Gayus-Lumbuun-Pengadilan-Bisa-Anulir-Grasi-Corby>,

<http://nasional.kompas.com/read/2012/05/26/06224851/Hukum.Tak.Bisa.Diintervensi>

2

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd3fb4011a22/inilah-alasan-ma-soal-grasi-corby>

<http://www.jurnas.com/news/62968>,

<http://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/02/02/grasi-di-indeonsia/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Grasi>

Jimly Asshiddiqie, Grasi Tak Tepat Disebut Hak Prerogatif Presiden, lihatlah <http://www.acehclick.com/jimly-grasi-tak-tepat-disebut-hak-prerogatif-presiden/>

Mahkamah Agung Sebut Tiga alasan pemberian grasi corby, lihatlah dalam http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=247743:ma-sebut-3-alasan-pemberian-grasi-corby&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91,

Mahkamah Agung, Grasi Corby Hak Prerogatif Presiden, lihatlah dalam <http://www.tempo.co/read/news/2012/05/23/063405733/MA-Grasi-Corby-Hak-Prerogatif-Presiden>,

Mahkamah Agung, Grasi Hak Konstitusional Presiden, lihatlah dalam <http://berita.liputan6.com/read/404695/ma-grasi-hak-konstitusional-presiden>

Muhamad Yasin, Apakah Keppres Pemberian Grasi Merupakan Objek Tata Tsaha Negara, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fd2756d2c45d/apakah-keppres-pemberian-grasi-objek-tun>

Paulus Effendi Lotulung, *Perkembangan Praktik Pengadilan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek Gugatan*, Makalah diterbitkan dalam <http://teguhalexander.blogspot.com/>

Surat Gugatan Gerakan Nasional Anti-Narkotika (GRANAT), Lihatlah dalam http://userfiles.hukumonline.com/redaksi/Gugatan_Granat_Grasi_Corby.pdf

Keputusan Presiden Soal Grasi 2 (*dua*) Warga Negara Asing Digugat ke PTUN, Lihatlah dalam <http://www.jurnas.com/news/62968>

Kuliah perdana disampaikan Oleh Prof. DR. Muchsan S.H dalam Kuliah Hukum Tata Usaha Negara pada Program Magister Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, tanggal 13 April 2012. Lihatlah dalam <http://suanrosh.blogspot.com/2012/05/konsekuensi-yuridis-dikecualikannya.html>,

Yusril Ihza Mahendra, Presiden Yudhoyono telah memberika Grasi kepada Dua Warga,maka lihatlah dalam <http://www.bacadulu.com/artikel/yusril-ihza-mahendra-presiden-yudhoyono-telah-memberikan-grasi-pada-dua-warga>

Yusril Ihza Mahendra, Salah Jika Grasi itu Hak Prerogatif Presiden. lihatlah dalam <http://www.itoday.co.id/politik/yusril-salah-jika-grasi-itu-hak-prerogatif-presiden>,

Yusril Ihza Mahendra, Pemberian Grasi, Tak Hilangkan Kesalahan Terpidana, <http://arsip.gatra.com/2002-09-24/artikel.php?id=20832>

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. V/MPR/1973 tentang peninjauan produk-produk yang berupa ketetapan-ketetapan MPRS RI

Ketetapan MPR RI No.III/MPR/1978 Tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/atau Lembaga-Lembaga Negara Tinggi Negara.